



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2025**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 dapat dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan kewajiban seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini mencakup perencanaan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Isi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada intinya adalah adanya penetapan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang susunan rencana kinerjanya seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Sekretariat DPRD untuk tercapainya program dalam tahun yang bersangkutan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dengan berpedoman pada program, kegiatan serta indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai wujud komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban kinerja yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance. Namun kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Demikian Rencana Kinerja (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 kami sampaikan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

BANJARNEGARA, 5 FEBRUARI 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA


dr. AHMAD SETIAWAN, MPH

Pembina Tk.I

NIP. 19720918 200501 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Bupati Banjarnegara beserta Wakil Bupati Banjarnegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud, membawa konsekuensi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kinerjanya secara optimal.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Gambaran singkat struktur organisasi Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugasnya :

1. Sekretaris DPRD ;
2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Program dan Keuangan; dan
 - c. Sub Koordinator Bagian Rumah Tangga;
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari ;
 - a. Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan; dan
 - b. Sub Koordinator Persidangan dan Hubungan Masyarakat;
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari ;
 - a. Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi; dan
 - b. Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD perumusan kebijakan daerah;

- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 37 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah, uraian tugas jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan tenaga ahli yang diperlukan DPRD agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi perencanaan dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja Sekretariat DPRD mencapai target yang telah ditetapkan;
- f. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi;
- g. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
- h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah merencanakan kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) program 15 (Lima belas) kegiatan dan 44 (Empat puluh empat) sub kegiatan. Dalam rangka melaksanakan tujuan yang kelima dan keenam dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Meningkatnya kualitas layanan publik, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menetapkan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD.
3. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. Survey Kepuasan Anggota DPRD;
2. Survey Kepuasan Masyarakat; dan
3. Nilai AKIP.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 pada dasarnya merupakan Pedoman bagi seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan Fungsinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN	4
A. Tugas dan Peran Organisasi	4
B. Keterkaitan RKT dengan Renstra	5
 BAB II : RENCANA KINERJA TAHUNAN	 6
A. Tujuan Strategis	6
B. Sasaran Strategis dan IKU Serta Target Program dan Kegiatan Pokok	 7
 BAB III : PENUTUP	 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN PERAN ORGANISASI

I. Data Umum

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD perumusan kebijakan daerah;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
3. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. KETERKAITAN RKT DAN RENSTRA

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 dalam penyusunan memperhatikan dokumen-dokumen rencana yang lain baik yang bersifat vertikal maupun horisontal.

1. Renstra yang menyangkut ketersediaan dokumen, visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian. Keterkaitan dan konsistensi antar komponen dalam Renstra dan proses penyusunan dan data pendukung.
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menyangkut ketersediaan dokumen, isi (sasaran beserta indikator output dan outcome serta targetnya, program, kegiatan beserta indikator input, proses, output, outcome) dan targetnya. Keterkaitan dan konsistensi komponen didalam RKT, keterkaitan dan konsistensi RKT dengan Renstra, proses penyusunan dan data pendukung.

3. Laporan Kinerja Tahunan, yang meliputi ketersediaan dokumen, isi (Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan analisis mengenai capaian kinerja. Keterkaitan dan konsistensi komponen didalam Laporan Kinerja Tahunan, keterkaitan konsistensi Laporan Kinerja Tahunan dengan Renstra, RKT dan PK serta proses penyusunan dan data pendukung.

Adapun regulasi yang menjadi rujukan dalam menyusun Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (RKT);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;
6. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026.

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. TUJUAN STRATEGIS :

Sesuai tugas, pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2023 - 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Berdasarkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Program dan Pendanaan Indikatif yang tercantum dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 pada BAB VI. Tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi maka Sekretariat DPRD kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2025, adalah mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya pada :

Tujuan 5 : ***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan***

Tujuan 6 : ***Meningkatnya kualitas layanan publik.***

Dalam rangka mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya pada Tujuan 5 dan 6 tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, dan program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program
1	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	1. Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD.	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD.	Nilai AKIP Sekretariat DPRD.	1. Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
----	--	---	------------------------------	--

B. SASARAN STRATEGIS DAN IKU SERTA TARGET PROGRAM KEGIATAN POKOK.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan target kinerja tahunan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada awal Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Kinerja
Sasaran 1 :		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.			
Indikator :		Indeks Kepuasan Anggota DPRD			
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	32.325.336.000	100 %
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	394.787.100	100 %
1.	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26.844.200	2 Paket
2.	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	352.942.900	22 Paket
3.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD"	15.000.000	1 dokumen
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	1.480.576.000	100 %
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1.480.576.000	11 Unit

6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	450.588.000	100 %
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	169.200.000	12 Laporan
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	281.388.000	12 Laporan
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	915.606.900	100 %
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	81.380.000	2 Unit
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	358.900.000	22 Unit
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106.337.700	8 Unit
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	368.989.200	1 Unit
8.	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	29.083.778.000	100 %
1.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	28.554.166.000	50 orang
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	457.084.000	1 Paket

3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	72.528.000	50 orang
II.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1. Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda	1. Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda	3.541.375.700	100 %
1.	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Tersedianya dokumen pembentukan perda dan peraturan DPRD	Persentase pemenuhan dokumen pembentukan perda dan peraturan DPRD yang disusun	3.541.375.700	100 %
1.	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.437.155.900	10 Dokumen
2.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	266.691.000	1 Dokumen
3.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	837.528.800	5 Dokumen
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	2. Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran	2. Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran	4.246.386.800	100 %
2.	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersedianya dokumen pembahasan kebijakan anggaran	Persentase pemenuhan dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang disusun	2.456.862.800	100 %
1.	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	402.508.600	1 Dokumen
2.	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	390.040.600	1 Dokumen
3.	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	402.641.100	1 Dokumen

4.	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	391.993.100	1 Dokumen
5.	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	8.126.600	1 Dokumen
6.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	861.552.800	1 Dokumen
3.	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pemenuhan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun	659.629.000	100 %
1.	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	97.075.000	15 Laporan
2.	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	108.510.000	15 Laporan
3.	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	108.030.000	15 Laporan
4.	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	116.485.000	15 Laporan
5.	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	446.723.000	1 Dokumen
4.	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersedianya laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Persentase pemenuhan laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD yang disusun	912.701.000	100 %
1.	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	912.701.000	1 Laporan

	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	3. Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan pendalaman tugas DPRD dan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	3. Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan pendalaman tugas DPRD dan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	2.975.192.000	100 %
		4. Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan Publikasi dan dokumentasi Dewan, Penyelenggaraan Humas, Penyusunan Program Kerja DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD	4. Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan Publikasi dan dokumentasi Dewan, Penyelenggaraan Humas, Penyusunan Program Kerja DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD	10.238.372.200	100 %
5.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya dokumen peningkatan kapasitas DPRD	Persentase pemenuhan dokumen peningkatan Kapasitas DPRD yang disusun	3.992.788.200	100 %
1.	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2.734.992.000	6 Dokumen
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	240.200.000	8 orang
3.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	270.938.200	7 dokumen
4.	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	656.893.000	1 dokumen
5.	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD	89.765.000	5 Dokumen
6.	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Tersedianya dokumen/laporan fasilitasi tugas DPRD yang disusun	Persentase pemenuhan dokumen/laporan fasilitasi tugas DPRD yang disusun	9.220.776.000	100 %

1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.912.457.000	4 Dokumen
2.	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	211.540.000	1 Laporan
3.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.519.351.000	12 Dokumen
4.	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	577.428.000	4 Dokumen
Sasaran 2 :		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada DPRD			
Indikator :		Indeks Kepuasan Masyarakat			
I.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	1.821.888.300	100 %
1.	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun	Persentase pemenuhan Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun	1.821.888.300	100 %
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	380.673.500	1 Dokumen
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1.441.214.800	3 Dokumen
Sasaran 3 :		Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD			
Indikator :		Nilai AKIP Sekretariat DPRD			
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	4.413.430..739	100 %
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18.000.000	100%

		kinerja perangkat daerah	yang disusun		
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.500.000	16 Dokumen
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.500.000	6 Laporan
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	4.173.815.739	100%
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.105.580.739	42 orang
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.235.000	12 Dokumen
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	221.615.000	100 %
1.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	221.615.000	22 orang
			JUMLAH	59.561.981.739	

BAB III

P E N U T U P

Sebagai bagian penutup dari Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah merencanakan beberapa sasaran dan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini, tepatnya 2 (dua) program yang menjadi prioritas sebagai bagian dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara. Namun demikian, disadari bahwa apa yang belum tercapai dan terlaksana selama tahun 2023 yang lalu kami yakini untuk dapat memperbaikinya di tahun 2024 dan 2025 ini,

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara 2025, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi maupun perbaikan pada system pengalokasian anggaran. Sebagai bentuk keseriusan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam memfokuskan pada sasaran terhadap perencanaan yang telah ditetapkan, maka kami akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penyusunan anggaran yang efektif
2. Memfokuskan sasaran kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.
3. Menyusun pelaporan-pelaporan sebagai bentuk pertanggung jawaban secara yuridis formil.
4. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap perencanaan pada tahun berjalan dalam rangka penyusunan perencanaan di masa yang akan datang.

Jika terdapat indikator pencapaian sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan kami sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya.

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 ini dapat berguna bagi semua stakeholder yang berkompeten dan terutama bagi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, sehingga prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerpan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Dengan harapan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara benar-benar dapat menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Secara teknis program dan kegiatan pada Tahun 2025 akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dioperasionisasikan melalui kegiatan-kegiatan di sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

BANJARNEGARA, 15 FEBRUARI 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA


dr. AHMAD SETIAWAN, MPH

Pembina Tk.I

NIP. 19720819 200501 1 008